



Pergerakan Islam dan Demokrasi di Indonesia

Gusti Muhamad Shadiq¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: getzenrodeo@gmail.com¹, ahmadihasan58@yahoo.com², masyithah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 02-05-2024 | Revised 25-05-2024 | Accepted 14-06-2024

Abstract

This research discusses the relationship between the movement of Islam and democracy in Indonesia, as well as how these two concepts influence and contribute to the country's social and political development. Although democracy is not explicitly mentioned in the Qur'an or Hadith, the principles of democracy are substantially reflected in Islamic teachings such as equality, deliberation (shura), cooperation (ta'awun), and good practices (taghyir). The experiences of Prophet Muhammad also provide an ethical and moral foundation that correlates with the basic principles of modern democracy. These Islamic values have become an integral part of Indonesia's constitution, including Pancasila and various laws governing the principles of democracy and divinity. Islam holds an important position in the Indonesian government, reflecting the majority Muslim population and the historical struggle for independence closely linked with the Muslim community. The influence of Islamic values in the Indonesian constitution has been achieved through the active participation of Indonesian Muslims in the democratization process, demonstrating that Islam and democracy can support each other and are not mutually exclusive. The conclusion of this research emphasizes that the integration of Islamic teachings and state policies is key to the success of democracy in Indonesia, avoiding conflict and strengthening harmony in national and state life. Keywords: khilafah, paradigma, fundamental, moderate, liberal.

Keywords: Islam, Democracy, Indonesia, Constitution, Deliberation

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara pergerakan Islam dan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan politik negara. Meskipun secara tekstual demokrasi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits, prinsip-prinsip demokrasi secara substansial tercermin dalam ajaran Islam seperti kesetaraan, musyawarah (syura), kerjasama (ta'awun), dan kebiasaan baik (taghyir). Pengalaman Nabi Muhammad juga memberikan landasan etika dan moral yang berkorelasi dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Nilai-nilai Islam ini kemudian menjadi bagian integral dari konstitusi Indonesia, termasuk Pancasila dan berbagai undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi dan ketuhanan. Islam menempati posisi penting dalam pemerintahan Indonesia, mencerminkan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan sejarah perjuangan kemerdekaan yang erat kaitannya dengan umat Islam. Pengaruh nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia dicapai melalui partisipasi aktif umat Islam dalam

proses demokratisasi, yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara ajaran Islam dan kebijakan negara adalah kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia, menghindari konflik dan memperkuat harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Indonesia, Konstitusi, Musyawarah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah, budaya, dan perkembangan sosial masyarakat selama berabad-abad. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, agama ini tidak hanya menjadi sumber kekuatan spiritual bagi individu, tetapi juga membawa dampak yang luas dalam membentuk identitas dan struktur sosial di wilayah kepulauan ini. Makalah ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis kontribusi yang telah dilakukan oleh pergerakan Islam di Indonesia, baik dari segi sejarah maupun perkembangan modernnya.

Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki sejarah panjang dan kaya dalam pergerakan Islam. Pergerakan ini telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas, budaya bangsa, serta dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, termasuk juga perkembangan politik.

Sejarah Awal Perkembangan Islam di Indonesia, Islam pertama kali masuk ke wilayah yang sekarang menjadi Indonesia melalui jalur perdagangan dan penyebaran dakwah oleh para pedagang dan ulama Muslim dari Timur Tengah dan Gujarat, India. Penyebaran Islam di kepulauan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perdagangan, perkawinan, dan proses akulturasi dengan budaya lokal. Seiring waktu, berbagai kerajaan Islam tumbuh di Nusantara, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Banten, yang menjadi pusat penyebaran Islam dan pembangunan peradaban Islam di Indonesia. Akar sejarah pergerakan Islam di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa awal kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-7 M. Sejak saat itu, Islam telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, dan telah melahirkan berbagai gerakan dan perkembangan organisasi Islam dikemudian hari.

Pergerakan Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam bidang sosial, politik, dan

budaya. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Gerakan Islam telah memainkan peran penting dalam melawan penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun Jepang, dengan menyatukan masyarakat di bawah satu semangat perlawanan.

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama merupakan cikal bakal dari pergerakan Islam awal, keberadaan beberapa organisasi Islam tersebut di Indonesia merupakan manifestasi dari berbagai faktor, seperti kebangkitan nasional, reformasi Islam, kebutuhan sosial dan politik, dan pengaruh dari luar negeri. Organisasi-organisasi Islam ini telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, baik dalam bidang agama, sosial, politik, maupun pendidikan.

Begitu juga peran Demokrasi telah memainkan peran penting dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Demokrasi memungkinkan umat Islam untuk memperjuangkan hak-hak mereka, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Meskipun terdapat beberapa tantangan, demokrasi dapat diperkuat dengan upaya bersama dari semua pihak untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Selain itu, pergerakan Islam juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan. Di masa lalu, pesantren-pesantren menjadi pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Bahkan, beberapa pondok pesantren telah berkembang menjadi Pendidikan modern pada masa sekarang, selain itu berdirinya universitas Islam terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kajian Pustaka (Library Research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Sistem Demokrasi Indonesia menurut Prespektif Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis berupa pemaparan data.

C. Sejarah Pergerakan Politik Islam di Indonesia

Begitu juga dengan pergerakan Politik Islam di Indonesia, Pergerakan politik Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks, terjalin erat dengan perjalanan bangsa. Akarnya tertanam jauh sebelum kemerdekaan, dengan munculnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan setelah kemerdekaan, mereka terus terlibat dalam politik dan masyarakat.

Indonesia, negeri dengan mayoritas penduduk Muslim, menyimpan sejarah panjang tentang pergerakan politik Islam. Jauh sebelum kemerdekaan, Islam telah menjadi kekuatan yang menjiwai perlawanan terhadap penjajah, sekaligus menjadi pemersatu bangsa.

Sejarah mencatat, pergerakan politik Islam di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari era pra-kemerdekaan hingga era Reformasi. Setiap fase memiliki karakteristik dan dinamikanya sendiri, mencerminkan konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

Pada masa penjajahan Belanda, muncul organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang memelopori perlawanan dan kebangkitan nasional. Sarekat Islam (SI), dengan basis massa yang besar, menyuarakan perlawanan terhadap penindasan dan mendorong persatuan umat Islam. Sementara Muhammadiyah fokus pada pembaharuan pendidikan dan dakwah Islam.

Peran politik Islam semakin menonjol dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Mohammad Natsir turut aktif dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945. Piagam Jakarta menjadi bukti komitmen para pendiri bangsa untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam.

Di awal abad 20, Indonesia mengalami masa kebangkitan nasionalisme yang diiringi dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Sarekat Islam (SI), organisasi massa pertama yang berlandaskan Islam di Indonesia. Didirikan pada tahun 1911, Sarekat Islam (SI) memelopori perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Pada masa ini, rakyat Indonesia mengalami berbagai tekanan dan diskriminasi dari pemerintah Hindia Belanda. Monopoli perdagangan oleh pengusaha Tionghoa dan eksploitasi ekonomi oleh Belanda semakin memperburuk keadaan rakyat. Di sisi lain, kaum Muslim Indonesia merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sarekat Islam menjadi organisasi massa terbesar di Indonesia pada masa itu dan memiliki pengaruh besar di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Sarekat Islam (SI) memelopori berbagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1913, SI mengadakan Kongres Nasional pertamanya di Semarang yang dihadiri oleh 62 cabang dari berbagai daerah di Indonesia.

Sarekat Islam (SI) juga aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. SI mendirikan sekolah-sekolah, koperasi, dan bank untuk membantu rakyat pribumi. SI juga mengadakan berbagai kegiatan dakwah untuk meningkatkan kesadaran Islam di kalangan rakyat.

Masa kemerdekaan menghadirkan dinamika baru dalam pergerakan politik Islam. Lahirnya partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) mencerminkan keragaman pemikiran dan strategi dalam mewujudkan cita-cita Islam. Masyumi, dengan platform politiknya yang tegas, memperjuangkan negara Islam. Sementara NU, dengan pendekatan kulturalnya, fokus pada pendidikan dan dakwah Islam di kalangan masyarakat.

Sampai pada masa Orde Baru (1967-1998), pemerintahan Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap semua bentuk kegiatan politik, termasuk politik Islam. Banyak organisasi Islam dipaksa untuk tunduk pada pemerintah, dan beberapa bahkan dibubarkan. Namun, resistensi terhadap rezim Orde Baru terus tumbuh, termasuk dari kalangan aktivis Islam.

Pada masa Orde Baru, terjadi represi terhadap gerakan politik Islam. Masyumi dibubarkan dan NU dipaksa untuk depolitisasi. Hal ini memicu munculnya gerakan Islam bawah tanah dan radikalisme. Era Reformasi membuka ruang baru bagi pergerakan politik Islam. Berbagai partai Islam kembali muncul dan aktif dalam kontestasi politik.

Pergerakan politik Islam di Indonesia telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dari perjuangan melawan penjajah, hingga dakwah dan pendidikan, kontribusi umat Islam tak dapat dipungkiri.

Namun, pergerakan politik Islam juga tak luput dari tantangan. Stigma radikalisme, politisasi agama, dan fragmentasi internal menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita Islam yang rahmatan lil alamin.

Mempelajari sejarah pergerakan politik Islam di Indonesia adalah sebuah keharusan. Dengan memahami akar sejarah, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu, mengambil pelajaran berharga, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan cita-cita Islam di masa depan. Begitu juga dengan belajar demokrasi, Jika dilihat dari perspektif normatif demokrasi sebagai kekuasaan mayoritas, demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam di tingkat negara, namun demokrasi yang diterapkan di dunia Barat diterima dengan hati-hati oleh banyak ulama (ulama) di Indonesia.¹

¹ Rahman Yasin, *Gagasan Islam tentang Demokrasi* [Islamic Ideas about Democracy] (Yogyakarta: AK Group, 2006), xvii.

Sejarah pergerakan politik Islam di Indonesia adalah narasi yang kaya dan kompleks. Memahami sejarah ini berarti memahami denyut nadi bangsa dan sumbangsih umat Islam dalam perjalanan Indonesia. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat melangkah maju dengan penuh optimisme, membangun Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai Islam yang universal.

D. Perkembangan Politik Islam di Indonesia

Pergerakan politik Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks, terjalin erat dengan perjalanan bangsa. Akarnya tertanam jauh sebelum kemerdekaan, dengan munculnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan setelah kemerdekaan, mereka terus terlibat dalam politik dan masyarakat.

Era Reformasi (1998-sekarang) membawa angin segar bagi politik Islam di Indonesia. Kebebasan berekspresi dan berpolitik yang lebih besar memungkinkan munculnya berbagai organisasi dan partai politik Islam baru. Beberapa partai Islam bahkan berhasil mencapai kursi penting dalam pemerintahan.

Namun, perkembangan politik Islam di era modern juga menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah kebangkitan kelompok-kelompok Islam radikal yang mempromosikan ideologi Islam garis keras. Kelompok-kelompok ini telah melakukan berbagai aksi kekerasan dan terorisme, yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di tengah perkembangan yang pesat, pergerakan politik Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Selain radikalisme, tantangan lainnya termasuk isu politisasi agama, intoleransi, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Selain itu pula wacana perkembangan politik Islam erat kaitannya dengan hubungan antara Agama dan negara, Hubungan negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perbedaan yang terus berkelanjutan tidak ada henti-hentinya di panggung dunia intelektual,² seperti apa yang disampaikan oleh C. Pierson bahwa perkembangan wacana agama dan negara lebih memanas dibarengi dengan

² Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menterjemahkan agama sebagai bagian dari negara, dan negara merupakan bagian dari dogma agama. Azyumardi Azra, "Pengantar," *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. ix.

munculnya konsep negara modern.³ Meminjam istilah Nazih Ayubi muslim politik (political Islamist), dan muslim kultural (cultural Islamist).⁴

Dari dua konsep tersebut tentunya mempunyai ciri khas dan kecenderungan masing-masing sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahtiar Effendy bahwa terdapat dua spectrum pemikiran politik Islam. *Pertama*, Islam harus menjadi dasar negara, shari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara karena kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Menurut kelompok ini bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation-state) selama ini bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, sementara pengakuan prinsip shura (musyawarah) dan aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. *Kedua*, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh ummah karena istilah dawlah yang mempunyai pengertian sistem politik tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an, dan al-Qur'an bukanlah buku ilmu politik.⁵

Dua kecenderungan ini mempunyai dampak dan pengaruh terhadap berkembangnya wacana ideologi politik Islam di Indonesia baik dari segi jargon politiknya maupun gerakan pembaharuannya.

Namun, di sisi lain, terdapat pula peluang bagi politik Islam untuk berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Politik Islam dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi, mempromosikan toleransi, dan mendorong kemajuan sosial dan ekonomi.

Pergerakan politik Islam di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Sejarah panjang dan perkembangannya di era modern menunjukkan bahwa politik Islam memiliki peran penting dalam kancah politik dan masyarakat Indonesia.

Di masa depan, politik Islam di Indonesia akan terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan kepemimpinan yang tepat dan komitmen yang kuat untuk demokrasi dan toleransi, politik Islam dapat menjadi kekuatan positif bagi kemajuan bangsa.

E. Islam dan Demokrasi di Indonesia

Ketika istilah demokrasi digunakan sebagai suatu sistem politik yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menimbulkan perdebatan sengit di kalangan

³ Menurutnya ciri negara modern antara lain, *pertama*, monopoli penguasaan atas alat kekerasan, *kedua*, batas teritorial, *ketiga*, kekuasaan mengatur, *keempat*, adanya konstitusi, *kelima*, kekuasaan yang bersifat impersonal, *keenam*, birokrasi publik, *ketujuh*, otoritas/legitimasi, *delapan*, kewarganegaraan, dan yang *kesembilan*, aturan perpajakan. Lihat dalam C. Pierson, *The Modern State* (London dan New York: Routledge, 1996), h. 2.

⁴ Nazih Ayubi, "Islamic State," dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 324.

⁵ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, trans. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), h.13-17.

umat Islam, dan istilah tersebut tidak diterima oleh beberapa pemerintahan di seluruh dunia. Pemerintahan otoriter juga menggunakan istilah demokrasi untuk menggambarkan rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya, kata demokrasi semakin banyak digunakan dalam mengatur ketertiban negara, seperti demokrasi liberal, demokrasi terkelola, demokrasi rakyat, dan demokrasi sosialis.

Salah satu aspek yang sering kali dan terus dibahas dalam Islam dan politik dalam perdebatan internasional baru-baru ini adalah perdebatan Islam yang berkesesuaian dengan demokrasi. Faktanya, upaya ini telah dilakukan di banyak negara untuk memberikan 'politik Muslim sipil, pluralis, dan bahkan dengan "wajah" demokratis.⁶

Demokrasi, meskipun diterima secara global, masih menjadi isu yang kompleks bagi umat Islam. Perdebatan dan keragaman interpretasi menunjukkan bahwa tidak ada satu definisi tunggal tentang demokrasi Islam. Masing-masing negara Muslim perlu merumuskan sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai dan konteksnya sendiri, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam bernegara.

Dapat dikatakan bahwa agama merupakan instrumen Ilahi untuk memahami dunia. Manusia memerlukan pegangan dalam mengarungi kehidupan dunia. Dalam kerangka ini, Islam tidak mempunyai kesulitan untuk menerima premis seperti itu. Salah satu utamanya adalah sifat ada-dimana mananya Islam (omnipresence). Artinya, dimanapun umat Islam berada, Islam hendaknya dijadikan sebagai petunjuk bagi perbuatan mereka.⁷

Namun hal yang harus selalu diingat bahwa semenjak berdiri, Islam meliputi 2 aspek, yaitu *aspek agama* dan *aspek masyarakat* atau *politik*. Berdasarkan itu maka Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal, tetapi mencakup kedua segi tersebut. Islam merupakan agama yang memberikan panduan (etik) bagi setiap aspek kehidupan.⁸

Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, namun menawarkan peluang untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan representatif. Implementasi demokrasi di negara-negara Muslim harus mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah masing-masing. Dialog dan kerjasama antar berbagai kelompok Muslim sangat penting untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana menerapkan demokrasi secara konsisten dengan ajaran Islam.

⁶ Yanwar Pribadi, *Islam, State and Society in Indonesia, Local Politics in Madura* (New York, Routledge, 2018) h. 5

⁷ Bahtiar Effendy, *Islam: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, alam Agama dan Demokratisasi: Kasus di Idonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 86

⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 1

Nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan sejalan dengan prinsip Islam, hal tersebut sebagaimana sejarah Islam menunjukkan contoh demokrasi pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin.

Diskursus demokrasi dan Islam muncul karena diawali oleh perdebatan antara Islam dan negara, demokrasi hanya salah satu dari banyak aspek perdebatan yang terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia.⁹

Beberapa kontroversi terhadap paradigma Islam dan demokrasi antara lain adalah; *Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang self-sufficient. Hubungan keduanya bersifat mutually exclusive, Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Dengan demikian, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, demokrasi sebagai konsep Barat tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat.

Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan dinegara-negara maju (Barat), sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara substantif.

Dan yang *ketiga*, bahwa Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.¹⁰

Dari tiga paradigma tersebut tampaknya Nurcholis Madjid menawarkan paradigma baru untuk membangun hubungan antara agama dan negara di Indonesia, yaitu paradigma "Simbiotik Multikulturalistik", dalam konsep ini agama bukan negara, dan negara bukan agama tetapi agama tidak lepas atau pisah dengan negara dan juga sebaliknya.

Walaupun agama dan negara tidak satu dan juga tidak pisah, tetapi tampaknya agama selalu berhubungan (mutualistik), saling membutuhkan antara satu dengan yang lain (agama dan negara). Dalam konteks ini agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama akan membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

Dengan demikian bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Statemen tersebut tentu meligitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling

⁹ A. Luthfi Assyaukanie, *Muslim Models of Polity: Islamic Arguments for Political Change in Indonesia, 1945-2005* (Melbourne: The University of Melbourne, 2006), h. 25

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi* (Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000), h. 34

membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (*shari'ah*).

Beberapa negara di dunia sebagian besar mengembangkan model simbiotik multikulturalistik ini, seperti Amerika Latin, Inggris dan Indonesia sendiri dengan negara Pancasila-nya sebagai dasar negara yang mempresentasikan hubungan yang selaras antara imparialitas negara dengan nilai-nilai agama yang dianut pemeluknya. Agama tetap bisa memberi sumbangan dalam kehidupan bernegara, dan negara selalu mengayomi kehidupan keagamaan di Indonesia, namun di sisi lain negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan negara sekular.

Di Indonesia, Pancasila (lima pilar yang akhirnya menjadi dasar negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial) pada dasarnya adalah kompromi antara Keadilan Sosial) pada dasarnya merupakan kompromi antara sekularisme, di mana tidak ada satu agama pun mendominasi negara, dan religiusitas, di mana agama (terutama Islam) menjadi salah satu salah satu pilar penting negara.¹¹

Islam bukanlah semata sebagai agama melainkan sebagai sistem kehidupan. Islam meliputi persoalan-persoalan keseluruhan bidang dari kehidupan manusia. Islam adalah orde sosial yang memuat pokok-pokok dari kehidupan manusia.¹² Namun demikian, sekarang Islam dihadapkan pada kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan negara-negara Islam sendiri berkaitan atau dihadapkan dengan wacana demokrasi. Yang kemudian berkembang secara integral dalam sistem kenegaraan dan ideologi politik di Indonesia.

Di pihak lain dikenal adanya faham tentang „demokrasi. Menurut kamus, demokrasi adalah „pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.¹³

Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*khilâfah* atau *imâmah*)

¹¹ Nadirsyah Hosen, *Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate*, Jurnal of Southeast Asian Studies 36 (Oktober 2015): 424

¹² Hussein Alatas, *The Democracy of Islam*, (Bandung: W. Van Hoeve Ltd.-The Hague And Bandung, 195) h. 38

¹³ Diane Ravitch, *What Is Democracy?*, terjemahan Budi Pyaritno, (Amerika: United States Information Agency, 1991), hal. 4.

merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan Ahl al-Imâmah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.¹⁴

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah seperti demokrasi yang dianut negara-negara Barat. Melainkan demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Abdurrahman Wahid menyesuaikan konsep demokrasi dengan budaya Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam sebagai rahmat li al-âlamîn (rahmat bagi seluruh umat manusia).¹⁵

Dengan demikian, membicarakan demokrasi berdasarkan sudut pandang doktrinal Islam tidak akan bertemu. Namun bila dilihat secara sosio-kultural, banyak nilai-nilai demokrasi yang tercakup dalam Islam. Misalnya ajaran “hablun min Allah wa hablun min al-nas,” yaitu menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dan komunikasi kharizontal dengan sesama umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk berhubungan dengan Tuhannya semata, melainkan harus juga mewujudkan proses komunikasi dengan sesamanya.

Di samping itu, di dalam Islam terkandung juga prinsip-prinsip persamaan, kebebasan memeluk agama, keadilan, musyawarah, dan keorganisasian yang semuanya ini secara substantif mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

F. KESIMPULAN

Islam dan demokrasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Secara tekstual, demokrasi sendiri tidak ada dalam Al-Qur’an Islam atau Hadits (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad). Namun secara implisit dan secara substansial, dasar-dasar demokrasi ada pada ajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadits. Prinsip ajaran Islam itu sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kesetaraan, musyawarah (syura), kerjasama (ta’awun), kebiasaan baik (taghyir).

¹⁴ Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176, h. 158

¹⁵ Yessyca Yunitasari, Sugiyanto, dan Kayan Swastika, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, Jurnal Historica: Volume. 1 (2017) Issue. 1 h. 80

Landasan etika dan moral dalam masyarakat umumnya diperoleh dari pengalaman Nabi Muhammad, yang berkorelasi dengan prinsip-prinsip dasar modern demokrasi. Nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut kemudian menjadi ciri khas konstitusi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila, serta berbagai undang-undang. Islam dan ajarannya menempati posisi penting dalam pemerintahan Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa Islam mendapat prioritas dalam kebijakan, mempunyai hierarki yang paling penting, tanpa mengurangi kepentingan dan pelayanan dari agama lain. Hal ini wajar karena Indonesia tidak hanya memiliki penduduknya mayoritas beragama Islam, namun juga sejarah lahirnya orang Indonesia kemerdekaan dan perumusan awal UUD Indonesia erat kaitannya dengan kepentingan umat Islam.

Konstitusi Indonesia adalah sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Hal ini dicapai melalui kesadaran dan keterlibatan umat Islam Indonesia dalam proses demokrasi. Dalam konteks Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam turut berkontribusi proses demokratisasi dan semakin menegaskan bahwa Islam tidak menentang demokrasi. Keduanya saling mendukung. Menghindari pertentangan antar ajaran Islam dan kebijakan negara merupakan jalan mulus bagi demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

Alatas, Hussein, *The Democracy of Islam*, W. Van Hoeve Ltd.-The Hague And Bandung, Bandung

Assyaukanie, A. Luthfi, *Muslim Models of Polity: Islamic Arguments for Political Change in Indonesia, 1945-2005* The University of Melbourne, Melbourne

Ayubi, Nazih, "Islamic State," dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Oxford University Press, Oxford

Diana, Rashda, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 1, Mei 2017

Effendy, Bahtiar,

Islam: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, alam Agama dan Demokratisasi: Kasus di Idonesia, Kanisius, Yogyakarta

Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia, trans. Ihsan Ali Fauzi, Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta

Hosen, Nadirsyah, *Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate*, Jurnal of Southeast Asian Studies

Madjid, Nurcholis, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi*, Voice Center Indonesia, Jakarta

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta

Pribadi, Yanwar, *Islam, State and Society in Indonesia*, Local Politics in Madura, Routledge, New York

Rahman Yasin, *Gagasan Islam tentang Demokrasi* (Islamic Ideas about Democracy), AK Group, Yogyakarta

Ravich, Diane, *What Is Democracy?*, terjemahan Budi Pyaritno, United States Information Agency, Amerika

Yasin, Rahman *Gagasan Islam tentang Demokrasi* (Islamic Ideas about Democracy), AK Group, Yogyakarta

Yunitasari, Yessyca, Sugiyanto, dan Kayan Swastika, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, Jurnal Historica: Volume. 1